

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

CV. Bio Teknologi Surabaya merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan komanditer (CV) yang didirikan pada tahun 2015 dan kini telah menjadi perusahaan terkemuka di Surabaya yang bergerak dibidang lingkungan pengolahan limbah seperti, unit pengolahan limbah cair (*waste water treatment plant*) atau biasa disebut dengan IPAL (instalasi pembuangan air limbah) dan unit pengolahan limbah padat (*incinerator*).

Selama 4 (empat) tahun bergerak dibidang tersebut, CV. Bio Teknologi Surabaya telah memiliki banyak pengalaman dalam menangani proyek mulai dari skala kecil, menengah, dan proyek dengan kapasitas besar yang membutuhkan perencanaan khusus. Hingga saat ini CV. Bio Teknologi Surabaya telah menangani ratusan proyek yang tersebar luas diberbagai kota di Indonesia.

4.1.2 Lokasi Perusahaan

Lokasi merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan suatu perusahaan, karena lokasi perusahaan ini sangat mempengaruhi aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jika keputusan pemilihan lokasi terdapat kesalahan maka akan berpengaruh besar terhadap investasi yang ditanamkan.

Berdasarkan uraian diatas, CV. Bio Teknologi Surabaya memilih lokasi perusahaan di Jl. Medayu Selatan IV No. 64, Rungkut, Surabaya. Karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang cukup strategis dimana banyak pangsa pasar yang potensial dan lokasi tersebut berada dikawasan industri sehingga mempermudah dalam mencari bahan baku yang diperlukan.

4.1.3 Ruang Lingkup Perusahaan

CV. Bio Teknologi Surabaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang lingkungan pengolahan limbah. Terdapat beberapa jenis limbah yang dikelola oleh perusahaan seperti limbah labolatorium, rumah sakit, klinik sampai

skala domestik seperti hotel, pabrik, pasar modern, dan bandara. Berikut ini merupakan ruang lingkup pekerjaan, sebagai berikut :

1. IPAL (instalasi pengolahan air limbah)
 - Fabrikasi
 - Desain dan pembuatan RAB
 - Jasa konsultan perencanaan
 - Instalasi dan konstruksi
 - Upgrade kapasitas
 - Renovasi IPAL
 - Kontrak service IPAL
2. Incinerator (alat pembakar sampah padat)
 - Fabrikasi
 - Desain dan pembuatan RAB
 - Jasa konsultan perencanaan
 - Instalasi dan konstruksi
 - Renovasi Incinerator
 - Membantu pengurusan perijinan Incinerator
 - Kontrak service Incinerator

4.1.4 Visi, Misi, dan Motto Perusahaan

Gambar 4.1

Visi	Misi
Menjadikan perusahaan Nasional terpercaya dan terdepan dalam hal penyedia alat pengolahan limbah	Menjadi mitra terpercaya bagi rekanan
Inovatif dan kualitas produksi komitmen kami	Berorientasi pada kualitas produksi
Menuju Indonesia sehat dan ramah lingkungan melalui pengolahan limbah karya anak bangsa	Motto
	Ketulusan hati membuat semangat bekerja dan berkarya

Visi, Misi, dan Motto
CV. Bio Teknologi Surabaya

4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan

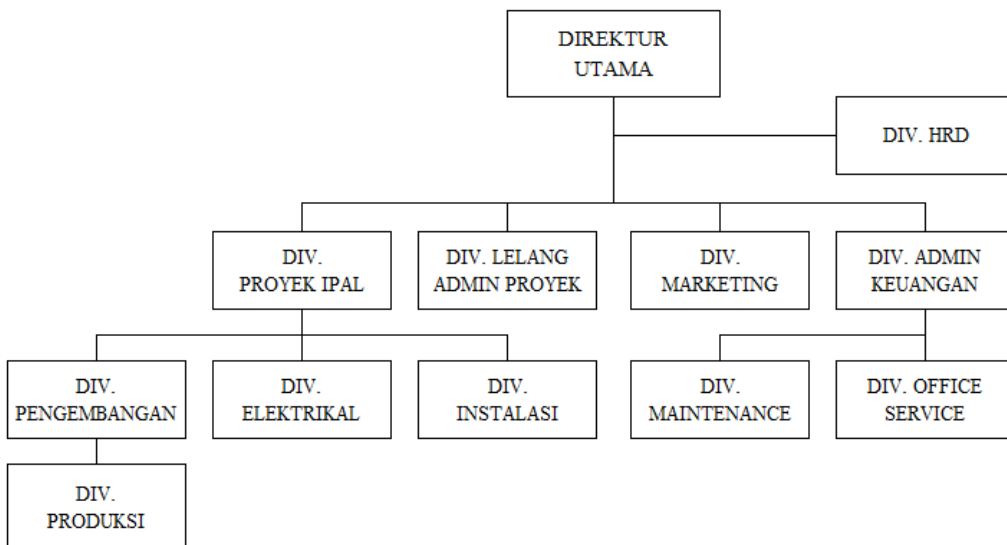
Peranan organisasi bagi perusahaan sangat penting, karena tanpa adanya organisasi yang baik maka perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya struktur organisasi, koordinasi dapat dilakukan dengan mudah antar bagian dan membuat bagian dalam perusahaan dapat berfungsi dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga tercipta sistem kerja yang efektif dan efisien.

Tugas pokok dari CV. Bio Teknologi Surabaya adalah membuat instalasi IPAL dan Incinerator sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan oleh pihak ketiga. Dalam melaksanakan tugas tersebut perusahaan mempunyai fungsi :

1. Ketenagakerjaan
2. Pemasaran
3. Proyek
4. Keuangan

Adapun struktur organisasi CV. Bio Teknologi Surabaya adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2



Struktur Organisasi

CV. Bio Teknologi Surabaya

Untuk mendukung tugas pokok CV. Bio Teknologi Surabaya, berikut penjelasan mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi :

1. Direktur Utama
 - Memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan
 - Bertanggung jawab terhadap penetapan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi perusahaan
 - Bertanggung jawab menentukan dan mengawasi pekerjaan karyawan
2. Divisi HRD
 - Bertanggung jawab terhadap perekrutan karyawan, pelatihan, dan pengembangan karyawan perusahaan
 - Bertanggung jawab atas dokumen karyawan
 - Bertanggung jawab atas gaji, bonus, dan absensi karyawan
3. Divisi Proyek IPAL dan Incinerator
 - a.) Divisi pengembangan
 - Bertanggung jawab terhadap pengembangan sebuah proyek dan memastikan bahwa proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai dengan budget, dan memenuhi sasaran kualitas.
 - b.) Divisi elektrikal
 - Bertanggung jawab terhadap hal yang menyangkut tentang elektrikal proyek dan memastikan bahwa tidak adanya trouble atau gangguan pada program mesin atau cara kerja mesin.
 - c.) Divisi instalasi
 - Bertanggung jawab terhadap instalasi (pemasangan) sebuah proyek dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh divisi pengembangan.
4. Divisi Administrasi Proyek
 - Bertanggung jawab terhadap semua data baik laporan dan dokumentasi proyek terduplikasi, terorganisir dan terjaga dengan baik.
5. Divisi Marketing
 - Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan perumusan kegiatan pemasaran agar dapat berjalan dengan lancar dan strategis.
6. Divisi Administrasi Keuangan
 - Bertanggung jawab terhadap kelancaran akuntansi perusahaan mulai dari penerimaan, pengeluaran, hutang, piutang, dan administrasi perpajakan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Ketenagakerjaan

Sistem penerimaan tenaga kerja di CV. Bio Teknologi Surabaya tidak jauh berbeda dengan penerimaan tenaga kerja perusahaan lain pada umumnya, dimana penerimaan pegawai disesuaikan dengan formasi yang telah ditetapkan perusahaan. Perusahaan juga mempunyai otoritas untuk memindahkan atau mutasi pegawai ke bagian atau pekerjaan yang lain jika dianggap perlu. Jika karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan perusahaan akan dikenakan pinalti berupa Surat Peringatan.

Penghasilan (upah) minimum mengikuti ketentuan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku, dan dasar penetapan upah berdasarkan pada jabatan, keahlian, kecakapan, dan prestasi kerja. Selain memperoleh upah terdapat beberapa tunjangan yang diberikan perusahaan antara lain : THR (Tunjangan Hari Raya) yang diberikan pada satu minggu sebelum hari raya yang besarnya minimal 1 (satu) bulan gaji bagi mereka yang telah bekerja lebih dari satu tahun, Tunjangan lainnya adalah pemberian uang makan, uang transportasi, dan uang telepon (berlangganan internet).

4.2.2 Kebijakan yang Diterapkan

Dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota pada perusahaan, agar dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kebijakan yang dianut oleh perusahaan meliputi masalah yang menyangkut karyawan dan keuangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Sistem Pengupahan

Pegawai tetap yang diterapkan pada CV. Bio Teknologi Surabaya adalah penghasilan (upah) bulanan, dimana setiap karyawan memperoleh gaji per tanggal 30 melalui ATM/ Bank yang telah ditunjuk oleh perusahaan setiap bulannya. Bonus yang diperoleh karyawan bagian produksi atau marketing merupakan perhitungan dari target yang telah dicapai oleh karyawan selama setahun (persentase jumlah produksi/penjualan produk).

2. Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang ditetapkan oleh CV. Bio Teknologi Surabaya untuk bagian produksi terbagi menjadi 2 (dua) shift dalam sehari, yaitu :

- Shift I : 08.00 – 16.00
- Istirahat : 12.00 – 13.00

- Shift II : 16.00 – 24.00
- Istirahat : 17.30 – 18.30

Setiap karyawan bekerja selama 6 (enam) hari dalam seminggu dan berhak libur 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pada masing-masing bagian, serta jika terdapat hari besar (tanggal merah dalam kalender) kegiatan operasi perusahaan diliburkan. Sementara untuk staf kantor memiliki jam kerja sebagai berikut :

- Senin – Jum’at : 08.00 – 16.00
- Istirahat : 12.00 – 13.00
- Sabtu : 08.00 – 12.00

3. Daftar Perincian Upah

Daftar perincian penghasilan (upah) ini dimuat dalam suatu lembar kartu gaji yang biasa disebut dengan slip gaji. Pada CV. Bio Teknologi Surabaya upah karyawan dirinci sebagai berikut :

- a.) Gaji pokok
Ditentukan berdasarkan jabatan, keahlian, kecakapan, dan prestasi kerja.
- b.) Bonus produksi/pemasaran
Ditentukan berdasarkan target yang dicapai (besarnya produk/penjualan).
- c.) Tunjangan lain-lain
Meliputi uang makan, uang transportasi, uang telepon (berlangganan internet), dan tunjangan hari raya. Apabila karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan perusahaan maka akan mengurangi jumlah tunjangan lain-lain.
- d.) Honorarium
Selain gaji, bonus, dan tunjangan lain-lain perusahaan juga memberikan tambahan penghasilan honorarium (upah lembur). Honorarium yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 1% (satu persen) per jam.

4.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 di CV. Bio Teknologi Surabaya adalah pada karyawan tetap dengan pemberian gaji yang diterima setiap bulannya yang berjumlah total 20 (dua puluh) karyawan. Dalam pemotongan PPh Pasal 21 CV. Bio Teknologi Surabaya menerapkan Metode Gross, dimana karyawan menanggung sendiri beban pajak penghasilannya.

Pajak penghasilan atas karyawan atau PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan pada penghasilan kena pajak masing-masing karyawan tetap perusahaan. Berikut ini adalah perincian penghasilan (upah) karyawan tetap di CV. Bio Teknologi Surabaya, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perincian Penghasilan (Upah) Tahun 2018

No	Nama Pegawai	Penghasilan	Bonus	THR
1	A	87.000.000	-	7.250.000
2	B	78.000.000	-	6.500.000
3	C	78.000.000	-	6.500.000
4	D	42.000.000	-	3.500.000
5	E	39.000.000	-	3.250.000
6	F	36.000.000	-	3.000.000
7	G	36.000.000	-	3.000.000
8	H	30.000.000	3.217.500	2.500.000
9	I	30.000.000	3.354.300	2.500.000
10	J	24.000.000	3.659.100	2.000.000
11	K	24.000.000	2.909.800	2.000.000
12	L	24.000.000	2.670.800	2.000.000
13	M	24.000.000	3.270.500	2.000.000
14	N	24.000.000	3.237.800	2.000.000
15	O	24.000.000	3.394.200	2.000.000
16	P	24.000.000	2.078.600	2.000.000
17	Q	24.000.000	1.812.500	2.000.000
18	R	24.000.000	1.552.100	2.000.000
19	S	24.000.000	1.443.800	2.000.000
20	T	24.000.000	1.150.000	2.000.000

Sumber : Data intern perusahaan

Didalam perincian penghasilan (upah) setahun terdapat beberapa tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, yang nantinya akan menambah penghasilan karyawan. Selain itu terdapat beberapa potongan-potongan yang akan mengurangi penghasilan karyawan yang nantinya akan dinikmati oleh pegawai, yaitu :

1. Tunjangan

Tunjangan yang diberikan oleh CV. Bio Teknologi Surabaya antara lain bonus, honorarium, tunjangan hari raya, dan natura yang tidak menambah penghasilan karyawan, seperti : uang makan, uang transportasi, dan uang telepon (berlangganan internet).

2. Pengurang (biaya)

Gaji pegawai setelah ditambahkan dengan beberapa tunjangan selanjutnya akan dikurangi dengan pengurang penghasilan (biaya). Pengurang yang dikenakan pada CV. Bio Teknologi Surabaya adalah biaya kesehatan (BPJS) sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulannya.

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 21
CV. Bio Teknologi Surabaya

Keterangan	Karyawan A K/2	Karyawan B K/0	Karyawan C K/1
Gaji Sebulan	7.250.000	6.500.000	6.500.000
Gaji Setahun	87.000.000	78.000.000	78.000.000
Tunjangan :			
- Tunjangan Hari Raya	<u>7.250.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.500.000</u>
Penghasilan Setahun	94.250.000	84.500.000	84.500.000
Pengurang :			
- Biaya Jabatan	(4.712.500)	(4.225.000)	(4.225.000)
- Iuran Kesehatan	<u>(1.740.000)</u>	<u>(1.560.000)</u>	<u>(1.560.000)</u>
Penghasilan Netto Setahun	87.797.500	78.715.000	78.715.000
PTKP	<u>67.500.000</u>	<u>58.500.000</u>	<u>63.000.000</u>
PKP Setahun	20.297.000	20.215.000	15.715.000
PPh Pasal 21 Terhutang	1.014.850	1.010.750	785.750
PPh Pasal 21 Sebulan	84.571	84.229	65.479

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

4.2.4 Perhitungan *Take Home Pay* Karyawan

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 pada CV. Bio Teknologi Surabaya terdapat 3 (tiga) karyawan yang jumlah penghasilannya diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Nett, Gross*,

dan *Gross-up* terhadap jumlah penghasilan (*take home pay*) yang akan diterima oleh karyawan, sebagai berikut :

1. Metode *Nett*

Metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* merupakan metode dimana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya. Berdasarkan pada perhitungan PPh Pasal 21, jika perusahaan menerapkan Metode *Nett* dalam pemotongan PPh Pasal 21 maka penghasilan yang akan diterima oleh karyawan selama setahun adalah sebagai berikut :

- Karyawan A – K/2
 - Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 - = Rp 87.797.500,00 - 0
 - = Rp 87.797.500,00
- Karyawan B – K/0
 - Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 - = Rp 78.715.000,00 - 0
 - = Rp 78.715.000,00
- Karyawan C – K/1
 - Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 - = Rp 78.715.000,00 - 0
 - = Rp 78.715.000,00

Berdasarkan perhitungan diatas, disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima karyawan merupakan penghasilan bersih atau tanpa potongan beban pajak PPh Pasal 21, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan. Kekurangan dari metode ini, perusahaan diharuskan mengeluarkan biaya yang lebih besar dari perhitungan semula serta akan menyulitkan perusahaan dalam menyusun anggaran kenaikan gaji.

2. Metode *Gross*

Metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* merupakan metode dimana karyawan menanggung sendiri beban pajak penghasilannya. Berdasarkan pada perhitungan PPh Pasal 21, jika perusahaan menerapkan Metode *Gross* dalam pemotongan PPh Pasal 21 maka penghasilan yang akan diterima oleh karyawan selama setahun adalah sebagai berikut :

- Karyawan A – K/2
 - Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 - = Rp 87.797.500,00 - Rp 1.014.875,00
 - = Rp 86.782.625,00

- Karyawan B – K/0
 - Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 - = Rp 78.715.000,00 - Rp 1.010.750,00
 - = Rp 77.704.250,00
- Karyawan C – K/1
 - Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 - = Rp 78.715.000,00 - Rp 785.750,00
 - = Rp 77.929.250,00

Berdasarkan perhitungan diatas, disimpulkan bahwa dengan karyawan menanggung sendiri pajak atas penghasilannya lebih memudahkan perusahaan dalam menganggarkan kenaikan gaji karyawan. Kekurangan dari metode ini, tidak ada biaya yang bisa digunakan untuk meminimalisir beban pajak penghasilan perusahaan.

3. Metode *Gross-up*

Metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* merupakan metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilannya. Berdasarkan pada perhitungan PPh Pasal 21, berikut ini perhitungan jumlah tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan dengan menggunakan rumus perhitungan tunjangan PPh Pasal 21, sebagai berikut :

- Karyawan A – K/2
 - Tunjangan pajak = (PKP Setahun - Rp 0) x 5/95 + Rp 0
 - = Rp 20.975.500,00 - Rp 0) x 5/95 + Rp 0
 - = Rp 1.068.289,47 (setahun), Rp 89.024,47 (sebulan)
- Karyawan B – K/0
 - Tunjangan pajak = (PKP Setahun - Rp 0) x 5/95 + Rp 0
 - = Rp 20.215.000,00 - Rp 0) x 5/95 + Rp 0
 - = Rp 1.063.947,37 (setahun), Rp 53.197,37 (sebulan)
- Karyawan C – K/1
 - Tunjangan pajak = (PKP Setahun - Rp 0) x 5/95 + Rp 0
 - = Rp 15.715.000,00 - Rp 0) x 5/95 + Rp 0
 - = Rp 827.105,26 (setahun), Rp 41.355,26 (sebulan)

Berdasarkan pada perhitungan PPh Pasal 21, jika perusahaan menerapkan Metode *Gross-up* dalam pemotongan PPh Pasal 21 maka penghasilan yang akan diterima oleh karyawan selama setahun adalah sebagai berikut :

- Karyawan A – K/2
 Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 = Rp 88.865.795,47 - 0
 = Rp 88.865.795,47
- Karyawan B – K/0
 Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 = Rp 79.778.947,37 - 0
 = Rp 79.778.947,37
- Karyawan C – K/1
 Penghasilan = Penghasilan Setahun - Pajak Terhutang
 = Rp 79.542.105,26 - 0
 = Rp 79.542.105,26

Berdasarkan perhitungan diatas, disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross-up* mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Tetapi biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya didalam laporan fiskal, sehingga dapat memberikan penghematan pajak (*tax saving*) bagi perusahaan.

4.2.5 PPh Pasal 21 Sebelum Perencanaan Pajak

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up* sebelum perencanaan pajak pada CV. Bio Teknologi Surabaya :

Tabel 4.3
Perbandingan PPh Pasal 21 Sebelum Perencanaan Pajak

No	Nama Karyawan	Metode	PPh Pasal 21 Terhutang	PPh Pasal 21 Sebulan
1	A – K/2	<i>Nett</i>	1.014.850	84.571
		<i>Gross</i>	1.014.850	84.571
		<i>Gross-up</i>	1.068.289	89.024
2	B – K/0	<i>Nett</i>	1.010.750	84.229
		<i>Gross</i>	1.010.750	84.229
		<i>Gross-up</i>	1.063.947	88.662
3	C – K/1	<i>Nett</i>	785.750	65.479
		<i>Gross</i>	785.750	65.479
		<i>Gross-up</i>	827.105	68.925

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa penghasilan (upah) yang diterima oleh setiap karyawan memiliki jumlah yang berbeda-beda pada setiap metode. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar sebesar Rp 2.811.375, secara *Gross* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar sebesar Rp 2.811.375, secara *Gross-up* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar sebesar Rp 2.959.342 Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21.

Dalam penerapan metode *Nett* mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya untuk menanggung biaya lebih besar, dan biaya tersebut bukan termasuk biaya yang dapat diakui dalam laporan keuangan fiskal (*nondeductible*). Dalam penerapan metode *Gross* mengharuskan karyawan menanggung sendiri beban pajak terhutang atas penghasilannya, sehingga upah (*take home pay*) yang diterima oleh karyawan akan mendapat pengurangan sebesar jumlah beban pajak terhutang. Dalam penerapan metode *Gross-up* mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar, akan tetapi biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya (*deductible*) didalam laporan keuangan fiskal. Sehingga akan memberikan penghematan pajak (*tax saving*) lebih besar dibandingkan menerapkan metode *Nett*.

4.2.6 Perencanaan Pajak

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam perkembangan dan pertahanan perusahaan, diharuskan mengadakan suatu program tertentu, begitu juga dengan CV. Bio Teknologi Surabaya. Cara untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan perusahaan yaitu dengan melakukan perencanaan, contoh yang dapat diterapkan yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menghasilkan penghematan pajak (*tax saving*)

Perencanaan pajak adalah proses perekayasaan atas transaksi wajib pajak agar beban pajak dalam jumlah yang seminim mungkin dan masih berada didalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dalam hal ini, CV. Bio Teknologi Surabaya belum melakukan perencanaan pajak, sehingga peneliti mencoba untuk membuat perencanaan pajak untuk mengefisiensi beban pajak penghasilan perusahaan. Berikut merupakan perhitungan laporan keuangan fiskal CV. Bio Teknologi Surabaya :

Tabel 4.4
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018
CV. Bio Teknologi Surabaya

Nama Akun	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penghasilan	4.621.659.963			4.621.659.963
HPP	<u>3.004.078.976</u>			<u>3.004.078.976</u>
Laba Kotor	1.617.580.987			1.617.580.987
Biaya Produksi (Usaha) :				
Entertainment	13.606.200	13.606.200		-
Makan dan Minum	45.922.636	45.922.636		-
Perjalanan Dinas	5.654.200	5.654.200		-
Telp dan Internet	16.494.507	6.100.000		10.394.507
Profesional	42.000.000	840.000		41.160.000
Biaya Lain-lain	<u>1.193.622.170</u>			<u>1.193.622.170</u>
	1.317.299.713			1.245.176.677
Penghasilan (Beban) Lain-lain				
Bunga Bank	891.635		891.635	-
Jasa Giro	8.774.583		8.774.583	-
Admin Bank	<u>(660.000)</u>			<u>(660.000)</u>
	9.006.218			(660.000)
Laba Bersih	309.287.492			371.744.310

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel Rekonsiliasi fiskal CV. Bio Teknologi Surabaya diatas, terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dibiayakan kedalam laporan fiskal seperti, biaya entertainment sebesar Rp 13.606.200,00, biaya makan dan minum sebesar Rp 45.922.636,00, perjalanan dinas sebesar Rp 5.654.200,00, biaya telepone dan internet sebesar Rp 6.100.000,00, dan biaya professional sebesar Rp 840.000,00. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi kurang efisien.

Dalam hal ini, peneliti membuat suatu perencanaan pajak agar biaya yang tidak dapat diakui kedalam laporan fiskal (mendapat koreksi fiskal positif) menjadi biaya yang dapat dibiayakan dalam laporan fiskal sesuai dengan peraturan perjakan yang berlaku. Strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak terhutang (yang harus dibayar) adalah memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto antara lain :

1. Biaya Makan dan Minum

mengubah biaya makan dan minum karyawan menjadi tunjangan makan dan minum sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a (biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha). Dengan mengubah biaya makan dan minum menjadi biaya tunjangan makan dan minum akan menyebabkan meningkatnya beban gaji sehingga saldo biaya makan dan minum yang terdapat pada laporan rekonsiliasi fiskal benar-benar jumlah biaya makan dan minum yang digunakan oleh perusahaan serta dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menurunnya jumlah beban pajak yang harus dibayar.

2. Biaya Perjalanan Dinas

mengubah biaya perjalanan dinas menjadi tunjangan perjalanan dinas sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a (biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha). Dengan mengubah biaya perjalanan dinas menjadi biaya tunjangan perjalanan dinas akan menyebabkan kenaikan pada komponen gaji sehingga saldo biaya perjalanan dinas yang terdapat pada laporan rekonsiliasi fiskal benar-benar jumlah biaya perjalanan dinas yang digunakan oleh perusahaan dan dapat menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayar.

3. Biaya Telepon dan Internet

mengubah biaya telepon dan internet menjadi tunjangan telepon dan internet sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a (biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha). Dengan mengubah biaya telepon dan internet menjadi biaya tunjangan telepon dan internet akan menyebabkan kenaikan pada komponen gaji sehingga saldo biaya telepon dan internet yang terdapat pada laporan rekonsiliasi fiskal benar-benar jumlah biaya telepon dan internet yang digunakan oleh perusahaan dan dapat menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayar.

Biaya yang dirubah menjadi tunjangan kepada karyawan, merupakan penghasilan bagi karyawan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterima. Sebaliknya, tunjangan pajak tersebut bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan dalam perhitungan penghasilan kena pajak diakhir tahun pajak. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan perencanaan pajak, sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Perencanaan Pajak

Keterangan	Karyawan A K/2	Karyawan B K/0	Karyawan C K/1
Gaji Sebulan	7.250.000	6.500.000	6.500.000
Gaji Setahun	87.000.000	78.000.000	78.000.000
Tunjangan :			
- Tunjangan Makan	2.296.132	2.296.132	2.296.132
- Tunjangan Transportasi	282.710	282.710	282.710
- Tunjangan Telepon	305.000	305.000	305.000
- Tunjangan Hari Raya	<u>7.250.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.500.000</u>
Penghasilan Setahun	97.133.842	87.383.842	87.383.842
Pengurang :			
- Biaya Jabatan	(4.856.692)	(4.369.192)	(4.369.192)
- Iuran Kesehatan	<u>(1.740.000)</u>	<u>(1.560.000)</u>	<u>(1.560.000)</u>
Penghasilan Netto Setahun	90.537.150	81.454.650	81.454.650
PTKP	<u>67.500.000</u>	<u>58.500.000</u>	<u>63.000.000</u>
PKP Setahun	23.037.150	22.954.650	18.454.650
PPh Pasal 21 Terhutang	1.151.857	1.147.732	922.732
PPh Pasal 21 Sebulan	95.988	95.644	76.894

Sumber : Data intern yang diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 diatas, dengan mengubah biaya usaha menjadi tunjangan (penghasilan bagi karyawan) akan meningkatkan pembayaran pajak PPh Pasal 21 sebesar 15% (dua puluh satu persen) daripada sebelum adanya perubahan. Berikut ini perbandingan laporan keuangan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up* untuk mengetahui penghasilan kena pajak (laba bersih) :

Tabel 4.6
Perbandingan PKP Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Keterangan	<i>Nett</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross-up</i>
Laba Kotor	1.617.580.987	1.617.580.987	1.617.580.987
Biaya Usaha	(1.245.176.677)	(1.245.176.677)	(1.245.176.677)
Tunj. Makan dan Minum	(45.922.636)	(45.922.636)	(45.922.636)
Tunj. Transportasi	(5.654.200)	(5.654.200)	(5.654.200)
Tunj. Telepon	(6.100.000)	(6.100.000)	(6.100.000)
Tunj. PPh Pasal 21	-	-	(3.391.918)
Penghasilan (Beban) Lain	<u>(660.000)</u>	<u>(660.000)</u>	<u>(660.000)</u>
Laba Bersih	314.067.474	314.067.474	310.675.556
PPh Badan	39.258.434	39.258.434	38.834.444

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah oleh penulis

4.2.7 PPh Pasal 21 Sesudah Perencanaan Pajak

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara Nett, Gross, dan Gross-up sesudah perencanaan pajak pada CV. Bio Teknologi Surabaya :

Tabel 4.7
Perbandingan PPh Pasal 21 Sesudah Perencanaan Pajak

No	Nama Karyawan	Metode	PPh Pasal 21 Terhutang	PPh Pasal 21 Sebulan
1	A – K/2	<i>Nett</i>	1.014.850	84.571
		<i>Gross</i>	1.014.850	84.571
		<i>Gross-up</i>	1.068.289	89.024
2	B – K/0	<i>Nett</i>	1.010.750	84.229
		<i>Gross</i>	1.010.750	84.229
		<i>Gross-up</i>	1.063.947	88.662
3	C – K/1	<i>Nett</i>	785.750	65.479
		<i>Gross</i>	785.750	65.479
		<i>Gross-up</i>	827.105	68.925

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah oleh penulis

4.2.8 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Tabel 4.8
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

No	Metode	Sebelum <i>Tax Planning</i>	Sesudah <i>Tax Planning</i>	Selisih
1	<i>Nett</i>	2.811.375	3.222.322	410.947
2	<i>Gross</i>	2.811.375	3.222.322	410.947
3	<i>Gross-up</i>	2.959.342	3.391.918	432.576

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis

Berdasarkan perbandingan diatas, diterapkannya perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 akan menambah jumlah beban pajak terhutang sehingga terjadi selisih, yang dirincikan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode Nett, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.811.375,00 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.222.322,00 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 410.947,00 atau sebesar 15% (lima belas persen)
2. Dengan menggunakan metode Gross, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.811.375,00 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.222.322,00 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 410.947,00 atau sebesar 15% (lima belas persen)
3. Dengan menggunakan metode Gross-up, sebelum diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang sebesar Rp 2.959.342,00 dan sesudah diterapkan perencanaan pajak jumlah beban pajak terhutang menjadi sebesar Rp 3.391.918,00 terdapat selisih (peningkatan) sebesar Rp 432.576,00 atau sebesar 15% (lima belas persen)

4.2.9 Dampak dari Perencanaan Pajak

Dilihat dari segi efisiensi antara pengurangan PPh terhutang yang diperoleh oleh CV. Bio Teknologi Surabaya dengan biaya yang dikeluarkan, maka dengan diberlakukannya perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 dengan mengubah biaya makan, transportasi, dan telepon (berlangganan internet) yang semula merupakan koreksi fiskal positif (*nondeductible*), menjadi tunjangan makan, transportasi, dan

telepon (berlangganan internet) yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) maka akan memberikan penghematan pajak (*tax saving*) yang cukup besar dibandingkan sebelum adanya perencanaan pajak.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang karyawan, dengan adanya perencanaan pajak maka terdapat tambahan penghasilan yang dimana akan memperbesar PPh terutang bagi karyawan. Sehingga membuat biaya pajak yang ditanggung karyawan menjadi lebih besar dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak atas PPh Pasal 21.

4.3 Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dengan menerapkan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 di CV. Bio Teknologi Surabaya dapat berpengaruh sangat luas dan kompleks bagi perusahaan, diantaranya :

1. PPh Pasal 21

dengan adanya tambahan penghasilan bagi karyawan mengakibatkan kenaikan penghasilan kena pajak para karyawan. Sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan beban pajak terutang sebesar

Rp 3.222.322,00 perhitungan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan beban pajak terutang sebesar Rp 3.222.322,00 dan perhitungan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan beban pajak terutang sebesar Rp 3.391.918,00.

2. Laba Komersial dan Laba Fiskal

- a.) Laba komersial

dalam laporan keuangan komersial menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 306.476.117,00, menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 309.287.492,00, dan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 306.328.151,00.

- b.) Laba fiskal

dalam laporan keuangan fiskal menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 314.067.474,00, menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 314.067.474,00, dan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 310.675.556,00

3. PPh Badan

dengan diterapkannya perencanaan pajak, akan mengubah jumlah beban pajak terhutang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan yang cukup signifikan. Perhitungan PPh Badan secara *Nett* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 39.258.434,00, perhitungan PPh Badan secara *Gross* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 39.258.434,00, dan perhitungan PPh Badan secara *Gross-up* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 38.834.445,00.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Temuan Penelitian

No	Keterangan	Metode <i>Nett</i>	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Gross-up</i>
1	PPh Pasal 21	3.222.322	3.222.322	3.391.918
2	Laba Komersial	306.476.117	309.287.492	306.328.151
3	Laba Fiskal	314.067.474	314.067.474	310.675.556
4	PPh Badan	39.258.434	39.258.434	38.834.445

Sumber : Data intern perusahaan yang diolah penulis